

ABSTRAKSI

Judul : Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Sebagai Fasilitator Komunikasi Dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Kepada Calon Pemilih Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2009 Di Wilayah Jawa Tengah
Nama : Irma Monalisa
NIM : DOC006058

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 2009 ini, KPUD Jawa Tengah kembali menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pada pemilu presiden ini, KPUD Jawa Tengah mencatat bahwa persentase jumlah golput mengalami peningkatan. Untuk itu, penulis meneliti peran Humas KPUD Jawa Tengah dalam mensosialisasikan anti golput pada pemilu Presiden. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan Kasubag Humas, Anggota KPUD, staff Humas, dan tiga calon pemilih dari latar belakang pekerjaan yang berbeda dengan menggunakan *interview guide*. Dalam sosialisasi ini humas berperan sebagai fasilitator komunikasi dalam mensosialisasikan anti golput kepada calon pemilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di wilayah Jawa Tengah.

Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai pelaksana sosialisasi ini. Meskipun bertindak sebagai pelaksana sosialisasi, segala keputusan mengenai sosialisasi diputuskan oleh Rapat pleno KPUD yang terdiri atas Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, serta struktural yang terdiri atas Sekretaris, tiga Kabag dan 6 Kasubag. Humas melakukan proses kegiatan komunikasi yang terdiri dari empat langkah/tahapan, antara lain: tahap *fact finding*, dalam tahap ini Humas mengumpulkan data yang menunjukkan peningkatan jumlah golput dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Tahap kedua *planning and programming*, pada tahap ini Humas menyusun informasi, mengagendakan diskusi, dan memilih media yang sesuai. Tahap ketiga *taking action and communicating*, dalam tahap ini Humas menjalankan program komunikasi seperti dialog dengan KNPI, dialog interaktif TVRI, sosialisasi pemilu dengan tema “info dan tata cara pemilu”, diskusi dengan media, audiensi dengan Komisi II DPR. Tahap keempat evaluasi program, dalam tahap ini Humas melakukan evaluasi pasca sosialisasi selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Humas telah menjalankan tugasnya cukup baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu segala keputusan mengenai Humas yang masih diatur sepenuhnya oleh rapat pleno, program-program komunikasi yang kurang merata serta evaluasi yang harusnya dilakukan secara bertahap.

Dosen Pembimbing

Djoko Setiabudi, S. Sos, MM
NIP. 1973.1228.200501.1.001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang membutuhkan peran penting Humas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan komunikasi mereka, seperti kegiatan sosialisasi anti golput pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Dalam kegiatan sosialisasi yang dijalankan Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini, Humas berperan sebagai fasilitator komunikasi. Sebagai fasilitator komunikasi, Humas disini bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan kepada calon publik agar maksud dan tujuan dari pesan tersebut dapat tercapai dan diterima calon pemilih. Humas menjadi penengah interaksi, menyusun agenda sosialisasi, meringkas dan menyajikan informasi, dan menjalankan program-program yang mendukung kegiatan sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 2009 ini, KPUD Jawa Tengah kembali menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pada pemilu presiden ini, KPUD Jawa Tengah mencatat bahwa persentase jumlah golput mengalami peningkatan.

Tabel 1

Persentase Jumlah Pemilih Golput Pada Pemilu 2008 dan 2009

Pemilu	Persentase
Gubernur 2008	41,54%
Legislative 2009	28,74%
Presiden & Wakil Presiden 2009	28,99%

Sumber: KPU Prov Jateng

Fakta ini menunjukkan bahwa pada pemilu Presiden dan Wakil presiden 2009, jumlah golput kembali mengalami peningkatan. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak calon pemilih yang kurang mengerti arti pentingnya menggunakan hak suara mereka. Dalam hal ini peran Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sangat diperlukan oleh organisasi karena Humas atau *Public Relations* dapat memainkan peran sebagai fasilitator komunikasi yang

bertugas memberikan sosialisasi anti golongan putih (golput) kepada calon pemilih di wilayah Jawa Tengah dengan tujuan masyarakat yang memiliki hak pilih dapat mengerti arti pentingnya menggunakan hak pilih mereka.

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya sosialisasi anti golput ini diharapkan tidak ada lagi jumlah pemilih golput pada setiap pemilihan umum. Namun pada kenyataannya, bahwa pada pemilu Presiden dan Wakil presiden 2009, jumlah golput kembali mengalami peningkatan. Angka pada table diatas menunjukkan bahwa masih banyak calon pemilih yang kurang mengerti arti pentingnya menggunakan hak suara mereka. Disini pihak Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berperan memberikan pemahaman kepada calon pemilih serta menghimbau calon pemilih agar mau menggunakan hak pilih mereka dengan benar melalui kegiatan sosialisasi. Akan tetapi terjadinya peningkatan jumlah pemilih golput pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 membuat peran Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dipertanyakan. Dengan penjelasan yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang muncul adalah “Bagaimanakah peran Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai fasilitator komunikasi dalam kegiatan sosialisasi anti golongan putih (golput) kepada calon pemilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di wilayah Jawa Tengah?”

C. Tujuan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai fasilitator komunikasi dalam kegiatan sosialisasi anti golongan putih (golput) kepada calon pemilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di wilayah Jawa Tengah.

D. Kerangka Teori

Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas, fungsi dan peran yang sangat penting, karena humas sangat berkaitan dengan khalayak organisasi yang mampu mengubah perilaku publiknya dalam hal ini yaitu calon pemilih Pemilu di wilayah Jawa Tengah. Menurut Edward L Bernay, dalam buku Rosady Ruslan yang berjudul ”Management Public Relations & Media Komunikasi” (2006:18) terdapat 3 fungsi utama humas :

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.

3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan /lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana sosialisasi anti Golput berperan sebagai fasilitator komunikasi. Karena disini, Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan calon pemilih. Humas bertanggung jawab menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada calon pemilih. Menurut Cutlip, Center & Broom, terdapat empat peran utama humas yang mendiskripsikan sebagian besar praktek humas, yaitu:

- a. Penasehat ahli (*expert prescriber*)
- b. Fasilitator komunikasi (*communication fasilitator*)
- c. Fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process fasilitator*)
- d. Teknisi komunikasi

(Cutlip, 2007:46).

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaksana sosialisasi, Humas melakukan proses kegiatan komunikasi yang terdiri dari empat langkah. Tahap awal dari proses tersebut adalah pencarian fakta dan perumusan masalah (*fact finding*), Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menghimpun data-data yang akurat serta fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kemudian tahap kedua, yaitu perencanaan dan program (*planning and programming*), Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menyusun dan mengagendakan program yang akan dijalankan. Setelah itu tahap ketiga, yaitu aksi dan komunikasi (*taking action and communicating*), pada tahap ini dilaksanakan program yang telah direncanakan dan dikomunikasikan kepada calon pemilih. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi (*evaluating*) terhadap acara yang telah dilaksanakan, tercapai atau tidaknya tujuan akan diketahui dalam tahap ini.

E. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Peran humas sebagai fasilitator komunikasi adalah Humas bertanggung jawab menyampaikan pesan kepada publik dengan menjadi penengah interaksi, menyusun agenda sosialisasi, meringkas dan menyajikan informasi, dan menjalankan program-program yang mendukung kegiatan sosialisasi.

2. Definisi Operasional

Peranan Humas Sebagai Fasilitator Komunikasi (*communication fasilitator*) dilakukan dengan proses kegiatan *public relations* yang terdiri dari empat langkah:

- Pencarian fakta dan perumusan masalah (*fact finding*)
 - Terdapat presentase pemilih golput yang cukup tinggi
- Perencanaan dan program (*planning and programming*)
 - Menyusun informasi mengenai pemilu
 - Mengagendakan diskusi/seminar
 - Menyesuaikan media komunikasi dengan calon pemilih
- Aksi dan Komunikasi (*taking action and communicating*)
 - Pelaksanaan diskusi/seminar
 - Penggunaan media komunikasi yang tepat untuk iklan
- Evaluasi program (*evaluating*)
 - Mengadakan evaluasi pasca sosialisasi

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, bersifat kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

3. Subjek Penelitian

- Kepala sub bagian Humas yaitu Hafidz Aam R, SE.
- Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yaitu Nuswantoro Dwiwarno, SH, MH.
- Staf bagian Humas yaitu Dimas D Narottama.
- Tiga Calon pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 yaitu Asngari, Amalia Noviana dan Tiara Santi

4. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

- Data Primer

Informasi diperoleh dari Bagian Program dan Data serta narasumber dari pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat umum yang

mempunyai hak pilih. Narasumber yang diambil untuk penelitian ini berjumlah enam orang. Narasumber tersebut yaitu:

1. Hafidz Aam R, SE merupakan Kepala Sub Bagian Humas
2. Nuswantoro Dwiwarno, SH, MH merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
3. Dimas D Narottama yaitu Staff Bagian Humas sebagai perwakilan staff
4. Asngari seorang pegawai negeri sipil (PNS)
5. Amalia Noviana seorang supervisor
6. Tiara Santi seorang pelajar SMA

➤ Data sekunder

Merupakan semua data yang berhubungan dengan sosialisasi.

b) Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan subyek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengambilan data yang diambil oleh penulis dengan datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

a) Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah *interview guide*.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara baik secara lisan maupun tertulis.

6. Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang pengujiannya dalam bentuk keterangan dan pembahasan teoritis yang bertujuan untuk menganalisa hal-hal yang dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi.

BAB III

HASIL PENELITIAN PERAN HUMAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI FASILITATOR KOMUNIKASI DALAM MENSOSIALISASIKAN ANTI GOLPUT KEPADA CALON PEMILIH PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009 DI WILAYAH JAWA TENGAH

Peranan Humas Sebagai Fasilitator Komunikasi (*communication fasilitator*)

Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai pelaksana sosialisasi ini. Meskipun bertindak sebagai pelaksana sosialisasi, segala keputusan mengenai sosialisasi diputuskan oleh Rapat pleno KPUD yang terdiri atas Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, serta struktural yang terdiri atas Sekretaris, tiga Kabag dan 6 Kasubag. Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaksana sosialisasi, Humas melakukan proses kegiatan komunikasi yang terdiri dari empat langkah/tahapan, antara lain:

a. Pencarian fakta (*fact finding*)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan data dari seluruh KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah dan mempersentasikan jumlah golput sehingga dapat dibandingkan jumlah pemilih golput pada pemilu-pemilu sebelumnya yaitu pemilu Legislatif dan Pemilu Gubernur. Penurunan jumlah golput pada pemilu Legislatif dari pemilu Gubernur, kemudian meningkat kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 menjadikan Humas menganalisa kembali mengapa peningkatan tersebut dapat terjadi.

b. Perencanaan dan program (*planning and programming*)

Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah senantiasa meningkatkan program-programnya agar sosialisasi dapat maksimal. Program-program yang disusun oleh Humas dalam sosialisasi ini adalah:

- Menyusunan Informasi Mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009
Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menyusun informasi yang dikumpulkan dan kemudian dikemas untuk disampaikan kepada calon pemilih.
- Mengagendakan Diskusi/Seminar

Dalam menyusun agenda diskusi, Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah hanya menyusun ulang jadwal yang sudah ditetapkan oleh rapat pleno KPUD.

- Penyesuaian media komunikasi dengan calon pemilih.

Media komunikasi dipilih dengan melihat siapa target audience yang akan dituju. Hal ini dimaksudkan agar pesan dari sosialisasi yang disampaikan melalui media tersebut dapat benar-benar dimengerti oleh calon pemilih.

c. Aksi dan Komunikasi (*taking action and communicating*)

Kegiatan diskusi atau seminar dilaksanakan beberapa bulan sebelum Pemilu dimulai.

Diskusi atau seminar yang dijalankan antara lain:

- Dialog dengan KNPI
- Dialog interaktif TVRI
- Sosialisasi Pemilu dengan tema “ info dan tata cara Pemilu”
- Diskusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan Redaktur media massa
- Audiensi bersama Komisi II DPR

d. Evaluasi program (*evaluating*)

Tolak ukur keberhasilan dari sosialisasi ini adalah naik atau turunnya persentase jumlah pemilih golput dari pemilu Legislatif ke pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan calon pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka dengan benar, sehingga tidak ada lagi jumlah pemilih golput pada setiap pemilu, atau setidaknya meminimalisir jumlah pemilih golput yang ada. Proses evaluasi dilakukan setelah kegiatan sosialisasi selesai dijalankan. Pada Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sendiri evaluasi dibahas pada rapat pleno KPU.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERAN HUMAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI FASILITATOR KOMUNIKASI DALAM MENSOSIALISASIKAN ANTI GOLPUT KEPADA CALON PEMILIH PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009 DI WILAYAH JAWA TENGAH

Peranan Humas Sebagai Fasilitator Komunikasi (*communication fasilitator*)

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menganalisa Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator komunikasi dalam mensosialisasikan anti golput kepada calon pemilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di wilayah Jawa Tengah. Humas harusnya memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi atau instansi dan duduk dalam koalisi dominan sehingga peran humas dapat dijalankan dengan maksimal. Dalam Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, humas mempunyai tugas sebagai pelaksana sosialisasi anti golput tetapi segala keputusan mengenai sosialisasi diputuskan oleh rapat pleno KPU yang melibatkan banyak pihak diluar divisi humas. Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaksana sosialisasi, Humas melakukan proses kegiatan komunikasi yang terdiri dari empat langkah/tahapan, antara lain:

a. Pencarian fakta (*fact finding*)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan data dari seluruh KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah dan mempersentasikan jumlah golput sehingga dapat dibandingkan jumlah pemilih golput pada pemilu-pemilu sebelumnya yaitu pemilu Legislatif dan Pemilu Gubernur. Disini Humas dapat mengetahui apakah jumlah golput pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengalami peningkatan atau penurunan. Data yang diperoleh Humas diperoleh dari laporan hasil rekapitulasi dari tiap kabupaten seJawa Tengah. Hanya berupa angka secara keseluruhan dari pemilih golput seJawa Tengah, sehingga tidak dapat menunjukkan persentase dari latar belakang pemilih yang golput. Seharusnya Humas juga memiliki data dari latar belakang mana jumlah golput terbanyak. Dengan demikian sosialisasi akan jelas lebih ditujukan kemana.

b. Perencanaan dan program (*planning and programming*)

Dalam menjalankan sosialisasi program-program yang disusun dan diagendakan dalam kegiatan komunikasi harus memasyarakat sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima masyarakat yang menjadi target *audience* dari kegiatan komunikasi yang dijalankan. Pada dasarnya tujuan dari program sosialisasi ini adalah agar masyarakat yang memiliki hak pilih dapat mengerti arti pentingnya menggunakan hak pilih mereka sehingga tidak ada lagi jumlah pemilih golput pada setiap pemilu atau setidaknya menurunkan persentase pemilih golput. Dalam sosialisasi anti golput ini, Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menyusun dan mengagendakan beberapa program pilihan. Tetapi program yang dijalankan humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah kurang melibatkan masyarakat secara aktif sebagaimana yang telah diungkap oleh ketiga narasumber dari calon pemilih yang telah diwawancara.

c. Aksi dan Komunikasi (*taking action and communicating*)

Dalam sosialisasi ini, Humas KPUD menjalankan beberapa kegiatan komunikasi yaitu berupa seminar atau diskusi. Tetapi kegiatan yang dijalankan oleh Humas kurang merata. Hanya menjangkau daerah perkotaan saja. KPUD Jawa Tengah sebagai instansi pemerintah yang melayani masyarakat di wilayah Jawa Tengah harusnya tidak hanya menjangkau daerah perkotaan besar saja, tetapi harus dapat menjangkau daerah-daerah dipelosok Jawa Tengah yang masih minim pengetahuan akan sosialisasi. Karena warga dipelosok daerah pun juga memiliki hak pilih dan termasuk dalam sasaran komunikasi dari sosialisasi anti golput ini.

Dalam kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yaitu sosialisasi anti Golput pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 juga memerlukan media sebagai sarana komunikasi dengan calon pemilih. Untuk menyampaikan pesan dalam sosialisasi anti golput ini, Humas haruslah cermat dalam memilih media yang akan digunakan agar calon pemilih dapat mengerti pesan yang terkandung dalam sosialisasi tersebut. Dalam sosialisasi anti golput ini, Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sudah tepat dalam memilih media sebagai sarana komunikasi.

b. Evaluasi program (*evaluating*)

Mengukur keberhasilan dari peran Humas KPUD Jawa Tengah itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dapat diketahui dalam tahapan evaluasi yang dilakukan oleh

pihak Humas itu sendiri. Berdasarkan hasil evaluasi itu bisa diketahui apakah-apakah program-program tersebut dapat dilanjutkan, dihentikan atau dilanjutkan kembali tentunya dengan melakukan beberapa tahapan perbaikan dan penyempurnaan. Sejauh ini Humas KPUD Jateng telah melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi dengan cukup baik, itu terlihat dari kegiatan evaluasi yang selalu dilakukan oleh pihak Humas KPUD terhadap semua kegiatan sosialisasi yang dibahas dalam rapat pleno KPU. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa evaluasi dilaksanakan melalui dua cara yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menjadi pelaksana kegiatan sosialisasi anti golput pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, tetapi segala keputusan yang menyangkut sosialisasi ditentukan oleh Rapat Pleno KPUD Jawa Tengah yang melibatkan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, serta struktural yang terdiri atas Sekretaris, tiga Kabag dan enam Kasubag.
2. Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memilih dan menggunakan media yang tepat untuk dijadikan sarana menyampaikan pesan dari sosialisasi anti golput ini. Media yang dipakai Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sudah disesuaikan dengan target audience nya dalam hal ini calon pemilih di wilayah Jawa Tengah.
3. Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menyusun, mengagendakan dan melaksanakan program-program komunikasi pilihan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan secara langsung dan tidak langsung.
4. Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi pasca kegiatan sosialisasi golput ini. Evaluasi dibahas pada Rapat Pleno KPU.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitasnya sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi anti golput kepada calon pemilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di wilayah Jawa Tengah. Berikut adalah saran yang dapat dijadikan rujukan, antara lain:

1. Sebaiknya Humas mengajukan usul kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah agar seluruh kegiatan humas dalam Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Tengah menjadi wewenang dan tanggung jawab divisi Humas seutuhnya tanpa campur tangan banyak pihak diluar divisi humas.

2. Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebaiknya lebih aktif dalam melaksanakan program-program komunikasi untuk mensukseskan sosialisasi golput ini dengan menambah jumlah personil yang turun ke lapangan serta menambah jadwal penyuluhan kepada calon pemilih, dan juga memperluas jangkauan sosialisasi, tidak hanya diperkotaan tetapi juga menjangkau ke daerah pedesaan. Serta menambah jumlah anggaran yang ada agar keterbatasan dana tidak menjadi hambatan.
3. Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah hendaknya tetap cermat dan teliti dalam pemilihan media yang tepat untuk mengkomunikasikan sosialisasi kepada publik. Humas harus pandai melihat situasi dan tidak menutup diri dengan perkembangan teknologi saat ini.
4. Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam tahap evaluasi harus pandai mencari solusi dan upaya dari kesalahan ataupun kekurangan dari program yang telah dijalankan. Dan evaluasi pun hendaknya dilakukan secara bertahap, setiap program selesai dilakukan segera diadakan evaluasi. Sehingga kegiatan sosialisasi mendatang akan lebih baik dan berhasil.